

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Implementasi Kebijakan Penanganan *Covid-19* merupakan suatu konsep yang digagas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan dilaksanakan melalui Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur yang berperan sebagai pemangku kebijakan utama dalam melaksanakan penanganan pada permasalahan *Covid-19* di Kabupaten Belitung Timur. Kebijakan Penanganan dari dampak pandemi di Kabupaten Belitung Timur tersebut dibuat dan dilaksanakan secara serempak di Kabupaten Belitung Timur dalam rangka menstabilkan kembali keadaan kehidupan masyarakat dari dampak atau akibat pandemi ini, aspek tersebut beberapanya dapat menghambat siklus pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Belitung Timur di tiap desa-desanya. Baik meliputi dampak yang terjadi pada masyarakat, maupun stabilisasi ekonominya sendiri di wilayah ruang lingkup pada tiap desa di Kabupaten Belitung Timur.

Maka dari itu dalam menjawab seluruh permasalahan dan persoalan yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Belitung Timur tersebut ialah dengan memberikan suatu solusi yang dibuat dan kemudian dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak terkait dalam penanganan *Covid-19* ini, ialah dengan penanganan pada kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan melalui penanggulangan atau penanganan penyakit menular, khususnya skala pada wilayah Kabupaten Belitung Timur yang dibuat Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berkaitan dengan penanganan dalam kebijakan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Belitung Timur ini, Menteri Kesehatan sebagai pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan memberikan atensi terhadap penanganan *Covid-19* sejatinya telah mengeluarkan (KEPMEN) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Wabah Penyakit menular *Covid-19* sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah penyakit dan penanggulangannya dalam menstabilkan kembali dampak dari pandemi di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah Kabupaten Belitung Timur. Penetapan tersebut menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam menstimulasikan kebijakan yang dibuat tersebut untuk diimplementasikan dalam upaya memulihkan kembali akibat dari dampak pandemi yang menjadi permasalahan dan persoalan besar di seluruh Indonesia, bahkan dunia.

Hal tersebut pun didasari oleh pertimbangan dan pengambilan keputusan yang sangat hati-hati bahwa infeksi *Covid-19* telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau *Public Health Emergency of International Concern*. Sehingga hal tersebut menjadi skala prioritas seluruh pemerintahan di Indonesia untuk lebih memerhatikan penanganan ini terhadap masyarakat di wilayahnya masing-masing, khususnya di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam upaya menselaraskan seluruh aspek-aspek atau nilai-nilai kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan semua agar hal tersebut mampu kembali normal atas kebijakan dan kontribusi serta partisipasi masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan dari akibat dampak pandemi *Covid-19*.

Dalam mempercepat penanganan atau penanggulangan terhadap *Covid-19*, maka dari itu pada saat peneliti melakukan observasi ke lapangan terdapat permasalahan mendasar yang sedang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Belitung Timur di masa pandemi *Covid-19*, permasalahan atau persoalan tersebut ialah berkenaan dengan masalah implementasi kebijakan, bantuan sosial, pemulihan perekonomian, pembagian vaksin, dan lain-lain. Yang mana Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur menjadi peran penting dalam upaya melaksanakan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat dalam mengatasi permasalahan di tengah pandemi ini. Selain itu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Sosial dan sesuai usulan 4.208 KK menerima bantuan dari Kementerian Sosial RI yang disalurkan oleh kantor pos dan bank. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Belitung Timur sebanyak 2.911 KK menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 600.000 khususnya bagi masyarakat yang mengalami penurunan ekonomi akibat pandemi ini yang mana bahwa bantuan sosial tersebut merupakan bantuan yang diberikan dari kementerian sosial dengan membuat kebijakan nasional yang menyangkut seluruh wilayah dalam pencegahan dan pengurangan atas dampak dari efek covid-19.

Berdasarkan hasil penulisan penelitian tentang Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Kebijakan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Belitung Timur, terdapat beberapa kendala yang ditemukan pada saat program tersebut dilaksanakan oleh Kabupaten Belitung Timur. Beberapa diantaranya ialah adanya penyaluran bantuan di lapangan yang tidak sesuai, bantuan yang melebihi aturan, dan kurangnya juga kesadaran masyarakat dalam mematuhi kebijakan yang dibuat. Karena masih adanya beberapa oknum masyarakat di wilayah Kabupaten Belitung Timur yang merasa dirinya tidak mampu, padahal dalam kehidupannya yang berkecukupan walaupun ditengah sedang dilanda dengan masa pandemi ini.

Penyaluran bantuan sosial yang diberikan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial kepada masyarakat Kabupaten Belitung Timur, beberapa diantaranya ialah bantuan sembako yang terdiri dari sembako minyak, sembako gula, sembako beras, dan lain-lain. Jika ditotalkan bantuan berupa sembako tersebut harus senilai Rp.200.000. per Kartu Keluarga (KK). Hal tersebut sudah menjadi ketentuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat yang tidak mampu karena dampak dari pandemi khususnya di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial itu sendiri berupa sembako, bantuan langsung tunai, vaksin gratis dan pembagian masker untuk diberikan kepada masyarakat. Bantuan diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.

Selanjutnya adapun kendala pertama bantuan di lapangan yang tidak sesuai, yang dimaksud tidak sesuainya teknis penyaluran bantuan tersebut sebagian ada yang diberikan kepada masyarakat yang kehidupannya sangat cukup bahkan masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mendapat bantuan yang layak sehingga bisa dikatakan terjadi kecemburuan sosial antar masyarakat yang merasa tidak diberikan dengan adil. Hal tersebut perlu diatasi oleh para pihak yang terkait seperti Perangkat Desa yang meliputi RT dan RW atau Dusun, lalu Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur perlu lebih memerhatikan dan mengawasi jalannya program penanganan kebijakan pandemi yang ada di Kabupaten Belitung Timur, agar terintegrasi oleh seluruh pihak yang terkait demi terwujudnya dan jalannya birokrasi pemerintahan yang berkaitan dengan kewajiban aparatur negara dalam melayani masyarakatnya terkait pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Table 1.2.
Data jumlah Masyarakat Kabupaten Belitung Timur 2021

Kode	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk
01	Manggar	39,483
02	Gantung	28,631
03	Dendang	10,616
04	Kelapa Kampit	19,054
05	Damar	13,162
06	Simpang Renggiang	7,487
07	Simpang Pesak	8,506
Jumlah		126,939

Selanjutnya dengan banyaknya masyarakat yang menerima bantuan melebihi aturan disebabkan lemahnya penyaluran bantuan sosial oleh sebab itu banyak masyarakat yang menerima bantuan melebihi aturan pada aturan yang sebenarnya jatah penerimaan bantuan langsung tunai banyak terjadi penerimaan BLT dalam satu KK melebihi satu orang. Sehingga hal tersebut memicu masalah pada dimensi Sumber Daya yang berkaitan dengan Kecukupan & kualifikasi. Adanya masyarakat yang seharusnya mendapatkan jatah bantuan sosial menjadi tidak dapat yang disebabkan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial lebih dari satu.

Salah satu lokasi yang peneliti kunjungi ke lapangan bertemu dengan Kepala Desa Bapak Mirwan. S.H sebagai Kepala Desa Mangkubang, Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, yang mana bahwa disana masih terdapat penyaluran bantuan yang tidak sesuai seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, adanya penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, hingga adanya data penerima manfaat yang tidak valid yang dikarenakan adanya data dari Kartu Keluarga yang terdata *double* saat penyaluran bantuan sosial dilaksanakan membuat *misscommunication* antara perangkat desa dan RT dan RW setempat, sehingga ini perlu dibenahi oleh perangkat desa dalam mengolah data yang diterima dari setiap RW nya sebagai kewilayahan yang lebih mengetahui situasi serta kondisi baik geografis maupun administrasi para penduduk di setiap RT nya. Oleh karena itu tentu hal ini harus diatasi oleh Dinas Sosial dengan memberikan arahan yang bersifat tegas terkait penginputan data warganya terhadap Perangkat Desa yang dibantu RT dan RW sebagai peran yang bisa dibilang lebih mengetahui situasi dan kondisi masyarakatnya di tiap kewilayahan

Bantuan sosial di masa pandemi ini lebih tepat diberikan untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial, maka sejak awal pandemi dapat dilakukan pendataan masyarakat yang terdampak *Covid-19*. Dan bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai hanya tinggal memasukkan nama identitas sesuai KTP di situs cekbansos.kemensos.go.id situs ini memang sengaja di buat agar masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kelurahan, kecamatan, kantor Dinas Sosial.

Table 1.3.
Data tanggapan masyarakat

Nama	Jawaban / keluhan
Pak Tin (Pelaku UMKM)	Turunnya daya beli masyarakat membuat UMKM mengalami penurunan karena tidak adanya pelanggan.
Devy (Mahasiswa)	Masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan peraturan seperti menggunakan masker di tempat keramaian dll
Pak Hendry (Kepala Keluarga)	Banyak pengurangan pegawai yang di Phk akibat pandemi, sehingga mengakibatkan penurunan ekonomi.
Bu Ida (Ibu rumah tangga)	Pembagian BLT masih kurang efektif karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Lalu yang kedua ialah adanya Komunikasi yang kurang bersinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan suatu kebijakan yang dimana ini berkaitan dengan masalah penyaluran bantuan sosial tadi, adanya masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial lebih dari satu dikarenakan adanya data ganda pada satu KK (Kartu Keluarga) yang terdata dan terinput oleh RT dan RW untuk dilaporkan kepada Desa, lalu dilaporkan kepada Dinas Sosial hingga ke pemerintah pusat. Sehingga masalah tersebut muncul karena komunikasi yang

kurang bersinergi antara Dinas Sosial, Perangkat Desa, RT dan RW. Serta masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, vaksin, dan tidak memakai masker ditempat keramaian sehingga masyarakat mudah terkena *Covid-19*.

Dinas Sosial dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berperan penting dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat dengan melakukan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Belitung Timur. Untuk mengatasi permasalahan dari dampak pandemi yang menjadi hambatan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur melakukan kerjasama dengan seluruh instansi yang berkaitan membentuk Gugus Tugas dalam upaya memberikan pelayanan bantuan pencegahan *Covid-19* di Kabupaten Belitung Timur dengan Visi dan Misi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik mengambil judul “Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Kebijakan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Belitung Timur”.

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan, fokus penelitian bersifat tentatif sesuai dengan berlangsungnya penelitian. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Kebijakan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Belitung Timur. Untuk mendalami permasalahan dalam fokus penelitian peran Dinas Sosial dalam Implementasi Kebijakan dalam penanganan *Covid-19* dengan beberapa dimensi yaitu, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi, untuk mengetahui seberapa penting Dinas Sosial dalam penanganan *Covid-19* di Kabupaten Belitung Timur.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat belitung timur pada masa pandemi *Covid-19* ?
2. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan terhadap implementasi strategi penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial pada masa pandemi *Covid-19*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Tujuan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat di masa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui upaya kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penanganan *Covid-19* di Kabupaten Belitung Timur.

1.4. Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai maka suatu penelitian harus jelas dan diketahui kebenarannya, adapun kegunaan yang diharapkan diperoleh dari penelitian di antara lain yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya terkait dengan Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Belitung Timur.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan tambahan referensi terhadap kebijakan terutama oleh Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur. Serta mencari informasi mengenai sebuah Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Kebijakan penyaluran bantuan sosial di masa Pandemi *Covid-19*.